

Kantor akuntansi Lembaga Masyarakat
Kelas IIB Merauke Kantor akuntansi
Lembaga Masyarakat Kelas IIB Mer
auke Kantor akuntansi Lembaga Pemasy
arakatan Kelas IIB Merauke Kantor akun

**ANTOR AKUNTANSI LAPAS
KELAS IIB MERAUKE**

Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal
30 Juni 2023

ant
Le
rau
ku
aga
Kant
Le
mbaga Masyarakat Kelas IIB Merau
ke Kantor akuntansi Lembaga Pemasy
arakatan Kelas IIB Merauke Kantor akunta
nsi Lembaga Masyarakat Kelas IIB
Merauke Kantor akuntansi Lembaga Pe
masyarakatan Kelas IIB Merauke Kantor
akuntansi Lembaga Masyarakatan Ke
las IIB Merauke Kantor akuntansi Lemba
ga Masyarakatan Kelas IIB Merauke Ka
ntor akuntansi Lembaga Masyarakatan
n Kelas IIB Merauke Kantor akuntansi Le
mbaga Masyarakatan Kelas IIB Merau
ke Kantor akuntansi Lembaga Pemasy
arakatan Kelas IIB Merauke Kantor akunta
nsi Lembaga Masyarakatan Kelas IIB
Merauke Kantor akuntansi Lembaga Pe

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Akuntansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Akuntansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Merauke, 03 Juli 2023

Kepala,

Lukas Laksana Frans,
NIP. 19740805 199902 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
Laporan Realisasi Anggaran	6
Neraca	7
Laporan Operasional	8
Laporan Perubahan Ekuitas	9
Catatan atas Laporan Keuangan	11
Penjelasan Umum	11
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	24
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	37
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
Pengungkapan Penting Lainnya	46
Lampiran dan Daftar	x

KANTOR AKUNTANSI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MERAUKE
JL.Ermasu Nomor.18, Merauke Papua Selatan Kotak Pos 138
TELEPON 0971-321178, FAXIMILE 0971-321178

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Merauke, 03 Juli 2023
Kepala,

Lukas Laksana Frans,
NIP.19740805 199902 1 001



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.11.180.056 atau mencapai 60 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.18.660.000.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni Tahun 2023 adalah sebesar Rp 5.665.884.451 atau mencapai 51 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 11.154.310.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023. Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.56.585.505.913 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.129.034.573; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.56.456.471.340; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.282.544.937, dan Rp.56.302.960.976.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.12.626.690, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.6.278.285.265 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(6.265.658.575) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.36 dan sebesar Rp.(6.265.658.539) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(6.265.658.539).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.56.913.915.120 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(6.265.658.539) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,-, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.6.654.704.395 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp.56.302.960.976,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan

basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR AKUNTANSI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MERAUKE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2023		%thd Angg	TA2022 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	18,660,000	11,180,056	60	10,219,440
JUMLAH PENDAPATAN		18,660,000	11,180,056	60	10,219,440
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	4.071.233,000	2.066.412.151	51	2,090,336,628
Belanja Barang	B.4	7.083.077,000	3.599.472.300	51	2,701,938,592
Belanja Modal	B.5	-	-	-	150,000,000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		11.154.310.000	5.665.884.451	51	4,942,275,220

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR AKUNTANSI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MERAUKE
NERACA
PER 30 JUNI 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas dan Bendahara Pengeluaran	C.1.1	24,000,000	-
Kas dan Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	1,446,670	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang jangka Pendek	C.1.7	-	-
Beban di Bayar dimuka	C.1.8	-	-
Pendapatan yang masih harus di terima	C.1.9	-	-
Persediaan	C.1.10	103,587,903	87.032.003
Persediaan yang Belum Diregister	C.1.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang jangka Pendek	C.1.12	-	-
Jumlah Aset Lancar		129.034.573	87.032.003
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	46,290,692,000	46,290,692,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	2,822,675,045	3,080,625,045
Gedung dan Bangunan	C.2.3	12,383,413,257	12,383,413,257
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	318,725	318,725
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(5,040,627,687)	(4,928,165,910)
Jumlah Aset Tetap		56,456,471,340	56,826,883,117
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan ganti Rugi	C.3.1	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	C.3.3	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	-	-
Aset Lain-lain	C.4.2	522.925.684	264,975,684
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(522.925.684)	(264,975,684)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		56,585,505,913	56,913,915,120
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	24.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	258.544.937	-
Utang Yang Belum di Tagihkan	C.5.3	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.4	-	-
Beban Yang Masih Harus di Bayar		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		282.544.937	-
JUMLAH KEWAJIBAN		282.544.937	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	56,302,960,976	56,913,915,120
JUMLAH EKUITAS		56.302.960.976	56.913.915.120
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		56,585,505,913	56,913,915,120

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR AKUNTANSI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MERAUKE
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	12,626,690	11,663,490
Jumlah Pendapatan		12,626,690	11,663,490
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	2,324,957,088	2,584,869,023
Beban Persediaan	D.3	273,600,100	122,966,300
Beban Barang dan Jasa	D.4	2,691,465,000	2,216,388,492
Beban Pemeliharaan	D.5	431,460,000	276,560,000
Beban Perjalanan Dinas	D.6	186,391,300	99,460,100
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	388,664,127
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Jumlah Beban		6,278,285,265	5,688,908,042
Surplus(Defisit) dari Kegiatan Operasional		(6,265,658,575)	(5,677,244,552)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Beban Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Surplus(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		36	2,620
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		36	2,260
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	36	2,620
Surplus(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(6,265,658,539)	(5,677,241,932)
Pos Luar Biasa			
Pendapatan Luar Biasa	D.12	-	-
Beban Luar Biasa		-	-
Beban Persediaan		-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT-LO		(6,265,658,539)	(5,677,241,932)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR AKUNTANSI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MERAUKE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023	2022
EKUITASAWAL	E.1	56,913,915,120	57,656,046,384
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(6,265,658,539)	(5,677,241,932)
DAMPAKKUMULATIFPERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHANMENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANGMENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
PenyesuaianNilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi NilaiPersediaan	E.4.2	-	-
KoreksiAtasReklasifikasi	E.4.3	-	-
Selisih RevaluasiAset	E.4.4	-	-
KoreksiAset Tetap NonRevaluasi	E.4.5	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.4.6	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSIAANTARENTITAS	E.5	5,654,704,395	4,932,055,780
KENIAKAN/PENURUNANEKUITAS		(610,954,144)	(745,186,152)
EKUITASAKHIR	E.6	56,302,960,976	56,910,860,232

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Akuntansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Kantor Akuntansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas berkedudukan di Jalan Ermasu Nomor. 18, Kota Merauke

Kantor Akuntansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Akuntansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke berkomitmen dengan misi **"mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan. Melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas."** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan,
3. Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya,
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 30 Juni Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Akuntansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Kantor Akuntansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Perintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Akuntansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Akuntansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor

Akuntansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di

neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau

- lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang

diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

AsetLainnya

e.Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang

dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

Satuan Kerja Kantor Akuntansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.10.507.883.000. Selama tahun 2023, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Akuntansi yang disebabkan adanya penyesuaian halaman III DIPA. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	18.660.000	18.660.000
Jumlah Pendapatan	18.660.000	18.660.000
Belanja		
Belanja Pegawai	4.071.233.000	4.071.233.000
Belanja Barang	7.083.077.000	7.083.077.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	11.154.310.000	11.154.310.000

Realisasi Pendapatan Rp 11,180,056

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 11.180.056 atau mencapai 60 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 18.660.000. Pendapatan Satuan Kerja Kantor Akuntansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN, Pendapatan Pendidikan dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	16.475.000	11.180.056	52.69
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	36	0
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum lainnya	2.185.000	2.500.000	114.42

Jumlah	18.660.000	11.180.056	60
---------------	-------------------	-------------------	-----------

Realisasi Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN TA 2023 mengalami penurunan (11,58) persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan menurunnya aktivitas Pelaksanaan Optimalisasi kegiatan Asimilasi WBP pada Kantor Akuntansi Lembaga Masyarakat Kelas IIB Merauke. Selain itu, terdapat penurunan pada Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar -99,93. Pada Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum lainnya mengalami kenaikan sebesar 525,00 persen karena Adanya Otimalisasi kegiatan pembinaan Kemandirian WBP.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	8.680.020	9.816.820	(11.58)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	36	2.620	(98.63)
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum lainnya	2.500.000	400.000	525
Pendapatan penjualan hasil produksi Non Litbang Lainnya	0	0	0
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0
Jumlah	11.180.056	10.219.440	9.40

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Kantor Akuntansi Lembaga Masyarakat Kelas IIB Merauke per 30 Juni Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.665.884.415

Realisasi Belanja Kantor Akuntansi Lembaga Masyarakat Kelas IIB Merauke per 30 Juni Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.665.884.451 atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp. 11.154.310.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I Tahun 2023 (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.071.233.000	2.066.412.151	51
Belanja Barang	7.083.077.000	3.599.472.300	51
Belanja Modal	0	0	0

Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	11.154.310.000	5.665.884.451	100
Pengembalian Belanja Pegawai	-	36	-
Jumlah	11.154.310.000	5.665.884.415	100

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 14,54 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 Juni 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Stabilitasnya Belanja Pegawai yang direalisasikan untuk.
2. Meningkatnya Belanja Barang untuk mendukung aktivitas perkantoran dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	2.066.412.151	2.090.336.628
Belanja Barang	3.599.472.300	2.701.938.592
Belanja Modal	0	150.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah	5.665.884.451	4.942.275.220

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp.
2.066.412.151

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2.066.412.151 dan Rp.2.090.336.628 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Semester I Tahun 2023 mengalami kenaikan penurunan (1,14) persen dari 30 Juni Tahun 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pegawai yang mutasi di tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.047.984.151	2.090.336.628	(1,14)

Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	0
Belanja Honorarium	0	0	0
Belanja Lembur	18.428.000	0	100
Jumlah Belanja Kotor	2.066.412.151	2.090.336.628	(1,14)
Pengembalian Belanja Pegawai	36	0	100
Jumlah Belanja	2.066.412.115	2.090.336.628	(1,14)

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp.3.599.472.300

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 30 Juni Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.3.599.472.300 dan Rp. 2.701.938.592 Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 33,57% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Peningkatan belanja pemeliharaan untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama,
2. Peningkatan Belanja Jasa langganan listrik dan air yang disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan,
3. Peningkatan Belanja Jasa Profesi untuk mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan diklat, dan
4. Peningkatan belanja barang berupa Bahan makan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Barang Operasional	2.327.996.000	1.981.821.100	17,47
Belanja Barang Non Operasional	230.869.000	130.918.000	76,35
Belanja Persediaan	407.456.000	196.925.000	106,91
Belanja Jasa	132.600.000	82.670.392	60,40
Belanja Pemeliharaan	314.160.000	210.144.000	49,50
Belanja Perjalanan Dinas	186.391.300	99.460.100	87,40
Belanja Barang Utk diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	3.599.472.300	2.701.938.592	33,58
Pengembalian Belanja Barang	-	-	-
Jumlah Belanja	3.599.472.300	2.701.938.592	33,58

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp.
0

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.150.000.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0% dibandingkan TA 2022 disebabkan usulan untuk belanja Modal belum di setujui sehingga tidak ada alokasi anggaran yang diberikan kantor Pusat.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	150.000.000	(100)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	(100)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	150.000.000	(100)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Rp 0

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0. Realisasi tersebut pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan pengadaan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Gedung pelayanan dan area untuk aktivitas perkantoran.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 0

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 adalah sebesar Rp 0, mengalami penurunan sebesar (100) persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp. 150.000.000. Tidak ada alokasi anggaran untuk belanja modal ditahun 2023. Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
CCTV	0	90.000.000	(100)
Printer	0	22.000.000	(100)
Camera Digital	0	15.500.000	(100)
Hand Talky	0	22.500.000	(100)
Jumlah Belanja Kotor	0	150.000.000	(100)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	150.000.000	(100)

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 0, Realisasi Belanja Modal per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0, dan Rp 0, Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Renovasi Gedung Kantor	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 0 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Jaringan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp 0

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0 % dibandingkan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar Rp
129.034.573

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Akuntansi Lembaga Pemasarakatan per per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 129.034.573 dan Rp. 87.032.003,-

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp 24.000.000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan(UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Akuntansi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke per per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 24.000.000 dan Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	24.000.000	0
Bank Mandiri No. Rek.	0	0

1030001123321		
Jumlah	24.000.000	0

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel xx

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Bank Mandiri No. Rek. 00000000000000	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp 0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp. 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak
Rp. 1.446.670

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 1.446.670 dan Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Piutang Bukan Pajak per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang PNPB	0	0
Piutang Lainnya	1.446.670	0
Jumlah	1.446.670	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
R 0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.		-	-
2.		-	-
3.		-	-
4.		-	-
5.		-	-
6.		-	-
	Jumlah	0	0

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp 0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.		-	-
2.		-	-
3.		-	-
4.		-	-
5.		-	-
	Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jk. Pendek Rp
0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kantor Akuntansi Lembaga Masyarakat Kelas IIB Merauke per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah

sebesar Rp 0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	-	-

Beban Dibayar di Muka
Rp 0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp 0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Kantor Akuntansi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Beban Dibayar di Muka TA per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp 0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Kantor Akuntansi Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Meraukeper Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022 (dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan

Rp 103.587.003

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan 1.446.670 masing-masing adalah sebesar Rp. 103.587.003 dan Rp. 87.032.003 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Persediaan
per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	16.687.000	132.000
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Amunisi	86.900.003	86.900.003
Jumlah	103.587.003	87.032.003

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp 0 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

Aset Tetap

Rp.56.456.471.340

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Akuntansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke per Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 56.456.471.340 dan Rp. 56.826.883.117

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Akuntansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

C.2.1. Tanah

Rp. 46.290.692.000

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Akuntansi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Meraukeper Tanggal 30 Juni Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 46.290.692.000 dan Rp. 46.290.692.000

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari	46.290.692.000
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Mutasi Kurang:	-
Revaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo Per 30Juni 2023	46.290.692.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku Per 30Juni 2023	46.290.692.000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Tanah30 Juni Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	28.021 m ²	Jl. Ermasu No. 18, Merauke	46.290.692.000
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			46.290.692.000

Peralatan dan Mesin

Rp. 2.822.675.045

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Akuntansi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.2.822.675.045 dan Rp.3.080.625.045

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 01 Januari 2023	2.822.675.045
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Hibah	-
Transfer Masuk	-
Koreksi Tambah	-
Mutasi Kurang:	-
Penghentian aset dari penggunaan	-
Saldo Per 30 Juni 2023	2.271.934.073
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	2.271.934.073

Nilai Buku Per 30 Juni 2023	550.740.972	798.0
------------------------------------	--------------------	--------------

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut:

Pembelian CCTV senilai Rp.90.000.000;

Pembelian peralatan komputer berupa *printer* senilai Rp. 22.000.000.; Pembelian Hand Talky senilai Rp. 22.500.000.; Pembelian Kamera Digital Senilai Rp. 15.500.000,

Transfer Masuk peralatan kantor senilai Rp.10.586.532

Koreksi Tambah berasal dari Reklas Keluar dan Masuk atas koreksi kodefikasi Aset dengan total . 15.500.000

Mutasi kurang merupakan penghentian penggunaan sebuah mesin genset yang sudah dalam kondisi rusak berat senilai Rp. 59.012.836 dan direklasifikasi ke dalam Aset tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp. 12.383.413.257

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 12.383.413.257 dan Rp. 12.383.413.257

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 01 Januari 2023	12.383.413.257
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	-
Mutasi Kurang:	-
Saldo Per 30 Juni 2023	12.383.413.257
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(2.768.693.614)
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	9.614.719.643

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp. 0

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 30 Juni 2022	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi Kurang:	

Aset Tetap Lainnya
Rp. 318.725

Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 30 Juni 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	-
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	-

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 318.725 dan Rp. 318.725 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 30 Juni 2022	318.725
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo Per 30 Juni 2023	318.725
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	-
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	318.725

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp.0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp. 5.040.627.687

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.040.627.687 dan Rp 4.928.165.910,- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023.

Tabel xxx
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	2.822.675.045	(2.271.934.073)	550.740.972
2.	Gedung dan Bangunan	12.383.413.257	(2.768.693.614)	9.614.719.643
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4.	Aset Tetap Lainnya	318.725	-	318.725
	Jumlah	15.206.407.027	(5.040.627.687)	10.165.779.340

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka Panjang
Rp. 0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Kantor Akuntansi Lembaga Masyarakat Kelas IIB Merauke per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kantor Akuntansi Lembaga Masyarakat Kelas IIB Merauke merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp. 0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Akuntansi Lembaga Masyarakat Kelas IIB Merauke per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-
5.	-	-	-
6.	-	-	-
	Jumlah	-	-

Tagihan Penjualan Angsuran Rp. 0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0. dan Rp. 0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Piutang TPA TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-

4.	-	-	-
5.	-	-	-
	Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp. 0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Kantor Akuntansi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Tabel xx
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Panjang
TA 2023

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Tagihan TPA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	-	-

Aset Lainnya
Rp. 522.925.684

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Akuntansi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 522.925.684 dan Rp. 264.975.684,-

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Akuntansi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke terdiri dari Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud
Rp. 0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 30 Juni 2022	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Saldo Per 30 Juni 2023	-
Amortisasi s.d. 30 Juni 2023	-
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	-	-
2.	-	-
	Jumlah	-

Aset Lain-Lain

Rp. 522.925.684

C.4.2. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain Kantor Akuntansi Lembaga Masyarakat Kelas IIB Merauke per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 522.925.684 dan Rp. 264.975.684,-

. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Akuntansi Lembaga Masyarakat Kelas IIB Merauke.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Lain-lain
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 01 Januari 2023	264.975.684
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	257.950.000
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	-
Saldo Per 30 Juni 2023	522.925.684
Amortisasi s.d. 30 Juni 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(522.925.684)
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	0

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan adalah dari penghentian penggunaan dari operasional perkantoran senilai Rp. 257.950.000.;

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Lainnya Rp.
522.925.684

per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. (522.925.684) dan Rp. (264.975.684),- Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	Software	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
B.	Aset Lain-lain	522.925.684	(522.925.684)	-
	Jumlah	522.925.684	(522.925.684)	-
	Total	522.925.584	(522.925.684)	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka Pendek Rp.
282.544.937

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kantor Akuntansi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.282.544.937 dan Rp.0.

Uang Muka dari KPPN Rp. 24.000.000

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.24.000.000 dan Rp. 0,- merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 258.544.937

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 258.544.937 dan Rp.0,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Akuntansi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	258.544.937
2.	-	-
3.	-	-

Total	258.544.937
--------------	--------------------

Pendapatan Diterima di Muka Rp. 0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
Jumlah	-

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp. 0

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2023 dan 2022(dalam rupiah)

Uraian	2022	2021
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas
Rp.56.302.960.976

C.7 Ekuitas

Ekuitas per per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 56.673.372.753 dan Rp. 56.913.915.120. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP
Rp.12.626.690

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 12.626.690 dan Rp. 11.663.490 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	8.680.020	9.816.820	(11,58)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	0
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum lainnya	2.500.000	400.000	525
Pendapatan penjualan hasil produksi Non Litbang Lainnya	0	0	0
Pendapatan Jasa Lainnya/Piutang Lainnya	1.446.670	1.446.670	0
Jumlah	12.626.690	11.663.490	8,26

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan Iuran Badan usaha, pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum lainnya, dan pengembalian belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp.2.324.957.088

Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2.324.957.088 dan Rp.2.584.869.023. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Gaji	2.306.529.008	2.090.336.628	(1,14)
Beban Tunjangan-tunjangan	0	0	0
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0

Beban Lembur	18.428.000	0	100
Jumlah Beban	2.324.957.008	2.090.336.628	(1,14)

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp. 273.600.100

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 273.600.100 dan Rp. 122.966.300,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksibaik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Persediaan Konsumsi	273.600.100	122.966.300	122,5
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	-	-	-
Beban Persediaan Amunisi	-	-	-
Jumlah Beban	273.600.100	122.966.300	122,5

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp.2.691.465.000

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2.691.465.000 dan Rp.2.216.388.492 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban-beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian aset sehingga tidak dilakukan penyewaan. Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami penurunan, terdapat beban Listrik dan jasa profesi yang meningkat karena disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan dan mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan diklat.

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	42.965.000	165.486.100	446,5
Beban Pengadaan Bahan Makan	2.159.991.000	1.724.750.000	41,07
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	65.700.000	54.750.000	0

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	3.600.000	0	0,22
Beban Honor Operasional Satker	55.740.000	38.400.000	12,14
Beban Bahan	181.184.000	93.629.000	88,23
Beban Honor Output Kegiatan	8.000.000	0	(21,72)
Beban barang Non Operasional lainnya	41.685.000	15.084.000	(35,19)
Beban barang Non Ops Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	
Beban Langganan Listrik	72.000.000	71.984.392	0,0001
Beban Langganan Air	27.000.000	20.250.000	(0,83)
Beban Jasa Profesi	21.600.000	7.200.000	(49,47)
Beban Jasa Lainnya	12.000.000	0	45,45
Beban barang Operasional Lainnya	-	0	-
Jumlah Beban	2.691.465.000	2.216.388.492	(35,1)

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp. 431.460.000

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 431.460.000 dan Rp. 276.560.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.200.000	138.000.000	4,22
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	113.960.000	75.965.000	154,93
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	117.300.000	62.595.000	755,65
Jumlah Beban	431.460.000	276.560.000	32,26

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp. 186.391.300

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 186.391.300 dan Rp. 99.460.100. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang

meningkat menjelang akhir tahun dan adanya Kegiatan dari Kantor Pusat dan Kantor Wilayah yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	169.591.300	99.460.100	44,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.800.000	0	171,09
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Jumlah Beban	186.391.300	99.460.100	52,69

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Rp. 0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah Beban	-	-	-

Beban Bantuan Sosial Rp. 0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada

kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	-	-	-
Jumlah Beban	-	-	-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 370.411.777

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 370.411.777 dan Rp. 388.644.127. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	123.667.406	265.587.195	(30,32)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	246.744.371	493.488.741	(49,99)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	-	759.075.936	(44,25)
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban	370.411.777	388.664.127	(44,25)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 20 per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah Beban	-	-	-

Kegiatan Non Operasional
Rp.36

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	36	2.620	(99,93)
Selisih Kurs	-	-	-
Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah Beban	36	2.620	(99,93)

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Nihil

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa per 30 Juni 2023 dan 2022.

Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Pendapatan PNBPN	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	-
Beban Persediaan	0	0	-
Jumlah Beban	0	0	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.
56.913.915.120

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 56.913.915.120 dan Rp. 57.656.046.384

Defisit LO
Rp.
(6.265.658.539)

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp. (6.265.658.539) dan Rp. (5.677.241.932),-Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0
Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0.

Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp. 0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2023

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	-
2.	Suku Cadang	-
Jumlah		-

Selisih Revaluasi Aset Rp. 0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp.0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain
Rp.0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Koreksi Lain-lain TA 2023

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar
Entitas
Rp.5.654.704.395

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.5.654.704.395 dan Rp.4.932.055.780

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel xx
Transaksi Antar Entitas TA 2023

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(11.180.056)
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.665.884.451
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	5.654.704.395

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan

belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023, DDEL sebesar Rp. 11.180.056 sedangkan DKEL sebesar Rp 5.665.884.451.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

TransferMasuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp.308.044.852 terdiri dari:

Tabel xx
Transfer Masuk TA 2023

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	Dirjen Pemasarakatan	-
2.	Persediaan	Dirjen Pemasarakatan	-
Jumlah			-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp. 0.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp. 0 dari total Rp. 0 yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Pengesahan Hibah Langsung TA 2023

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	UNICEF	Uang	-
2.	Universitas AKA	Barang	-
Total Pengesahan			-
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Ekuitas Akhir Rp.
56.302.960.976

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 56.302.960.976 dan Rp. 56.910.860.232,-

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.1 Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan PMK 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka *Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Akuntansi Lembaga Masyarakat Kelas IIB Merauke pada tanggal 01 Januari 2023 telah ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan,

Sebagai berikut;

Kuasa Pengguna Anggaran	: Lukas Laksana Frans
Pejabat Pembuat Komitmen	: Bekti Utomo
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Meri Ginsel
Bendahara	: Abdul Latif Umbalak